

## **Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo**

**Hari Eka Setiyawan<sup>1</sup> ; Muhammad Safri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

<sup>2</sup>) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

### **Abstract.**

This research is intended to analyze the influence of public accountability, public transparency and control to the SKPD performance with the local financial management as a variable intervening. The population in this study is SKPD environment Bungo district government. The simultaneous and partial test of the hypothesis is done with test “F” and test “t” using the path analysis method. Results shows that simultaneously public accountability, public transparency, control, and local financial management, affect the performance of SKPD in Bungo district government. Partially, public accountability, public transparency, control, and local financial management affect the performance of SKPD in Bungo district government. Results shows that simultaneously public accountability, public transparency, and control, affect to local financial management. Partially public accountability, public transparency and control affect on local financial management, so that local financial management is not an intervening variable in this study

*Keywords: Public Accountability, Public Transparency, Local Financial Management,*

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap kinerja SKPD dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Populasi pada penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial digunakan Uji F dan Uji t dengan menggunakan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara simultan akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.

*Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah*

### **PENDAHULUAN**

Bergulirnya otonomi daerah dimulai sejak ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut efektif dilaksanakan pada Januari 2001 sebagai awal dimulainya otonomi

daerah. Dalam perjalanannya kedua UU tersebut dirasakan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan politik serta ketatanegaraan. Besarnya tuntutan publik dan pemerintah daerah agar merevisi ulang kedua UU tersebut ditandai dengan disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam kedua UU semakin mengukuhkan otonomi daerah dan desentralisasi kepada setiap daerah. Hal ini jelas membawa konsekuensi yang besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah.

Ditahun 2014 pemerintah bersama DPR mencabut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan menggantikannya dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan isu sentralnya yaitu tentang pemerintahan daerah tidak terdapat lagi pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Perihal pemilihan kepala daerah telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian UU Nomor 23 Tahun 2014 seseuai dengan isu sentralnya lebih fokus mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Proses perencanaan dimulai dengan kegiatan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedaoman RPJMD kemudian membuat rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD. Kemudian pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun rencana pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD kemudian diajukan dan dibahas bersama dengan legislatif untuk kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum RAPBD dirancang dimulai dengan dengan pengusulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh setiap SKPD. RKA-SKPD berisi tentang kebutuhan anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. RKA-SKPD kemudian dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat memberikan *output* dan *outcome* serta *impact* yang dihasilkan dari program dan kegiatan tersebut. Setelah pembahasan RKA-SKPD pemerintah daerah mengajukan taksiran kebutuhan yang menyangkut penerimaan, pengeluaran (belanja) dan pembiayaan selama 1 (satu) tahun dalam bentuk rancangan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD). KUAPBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD. Hasil dari pembahasan tersebut

menghasilkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun bersangkutan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik. Dimana setiap SKPD mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik, SKPD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lain halnya dengan transparansi publik, SKPD bersedia menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya kepada pihak luar, tentunya dalam hal ini masyarakat umum/publik. Pada akhirnya akuntabilitas publik dan transparansi publik menjadi suatu kebutuhan pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung (kepala SKPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas *intern* (Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)) dan pengawas *ekstern* (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)), dan pengawasan yang ketiga dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel.

Sejak berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara setiap tahunnya secara rutin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Evaluasi kinerja juga dilakukan pada SKPD, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat melakukan evaluasi kinerja pada SKPD. Evaluasi kinerja SKPD sangat dibutuhkan untuk mengukur pencapaian kinerja SKPD dan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur-unsur yang ada dimasyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama proses perencanaan, yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang masih mementingkan segelentir orang/golongan berakibat kegiatan pembangunan daerah tidak berdampak terhadap masyarakat luas. Pemerintah daerah dianggap kurang mampu dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang telah dibuatnya kepada publik (masyarakat). Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 (LHP Sistem Pengendalian Intern), Nomor: 34.B/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, Tanggal 25 Mei 2015 mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum menetapkan produk hukum yang bersifat teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dipertanyakan.

Sedangkan fenomena terkait dengan transparansi publik, buku I LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 (LHP Laporan Keuangan), Nomor: 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015, Tanggal 25 Mei 2015) juga mengungkapkan masih ditemukan adanya kerugian, ketidakhematan, ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi belanja daerah juga belum berorientasi kepada kepentingan publik, belanja masih sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Dengan temuan tersebut transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah masih belum menjadi kenyataan.

Dalam buku II LHP BPK Nomor: 34.B/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, Tanggal 25 Mei 2015 juga mengungkapkan masih lemahnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung (pengguna anggaran) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Aparat pengawas intern pemerintah (inspektorat) belum optimal memfungsikan perannya dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Demikian halnya dengan DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan, pengawasan belum dilaksanakan secara aktif dan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah.

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu alat ukur dalam pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun dari terakhir tidak mengalami perbaikan. Pemerintah Kabupaten Bungo masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Bungo walau setiap tahunnya mengalami perbaikan, tetapi masih belum cukup memuaskan. Predikat penilaian kinerja yang dilakukan oleh KemPAN-RB untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bungo mendapatkan nilai CC (cukup baik/memadai). Rekomendasi KemenPAN-RB untuk perbaikan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bungo diantaranya perlu melakukan evaluasi secara internal terhadap akuntabilitas kinerja dan program SKPD, melakukan revaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja sasaran agar dapat memberikan gambaran tentang hasil, relevansinya dan dapat pula mengukur seberapa jauh pencapaian sasaran yang diinginkan. Kemudian berkaitan dengan transparansi publik KemenPAN-RB juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo agar LAKIP dimuat dalam laman (*website*) Pemerintah Kabupaten Bungo.

Penilaian kinerja yang dilakukan Inspektorat terhadap SKPD yang ada dalam Pemerintah Kabupaten Bungo hasilnya juga belum memuaskan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja SKPD Kabupaten Bungo Tahun 2014, Nomor : 700/44/Inspektorat/2015 tanggal 30 Maret 2015, dari 46 (empat puluh enam) SKPD yang dievaluasi kinerjanya, 3 (tiga) SKPD mendapatkan predikat penilain CC (cukup baik/memadai), 21 (dua puluh satu) SKPD mendapatkan predikat penilain C (agak kurang), 5 (lima) SKPD mendapatkan predikat penilain D (kurang) dan 17 (tujuh belas) SKPD tidak dapat dievaluasi karena tidak membuat laporan kinerja.

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Siregar (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar, sedangkan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan Suparno (2012), dalam penelitiannya menunjukkan akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai, sedangkan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Tuasikal (2008) menunjukkan

bahwa pengawasan internal/eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Adiwirya (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kota Denpasar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suriani (2015) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten Wajo. Penelitian lainnya yang dilakukan Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun. Sejalan dengan hasil penelitian Adiwirya (2015) dan Arida (2012), penelitian yang dilakukan Hazmi (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial aparatur Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe. Untuk variabel pengawasan terhadap kinerja hasil yang dilakukan Sugeng (2014) menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kediri berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengawasan internal/eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Sedangkan untuk variabel pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja, beberapa penelitian diantaranya yang dilakukan oleh Magno (2015) menunjukkan hasil ada pengaruh signifikan pengelolaan anggaran terhadap kinerja kerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Ainara, yang artinya semakin tinggi pengelolaan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng (2014) menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2015) yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008) pengelolaan keuangan berpengaruh relative rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Mengacu pada paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat cukup alasan guna mengkaji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja SKPD dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Terdapatnya perbedaan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya memberikan cukup acuan untuk mengkaji penelitian ini pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo yang akan dilihat adalah kinerja seluruh SKPD yang ada.

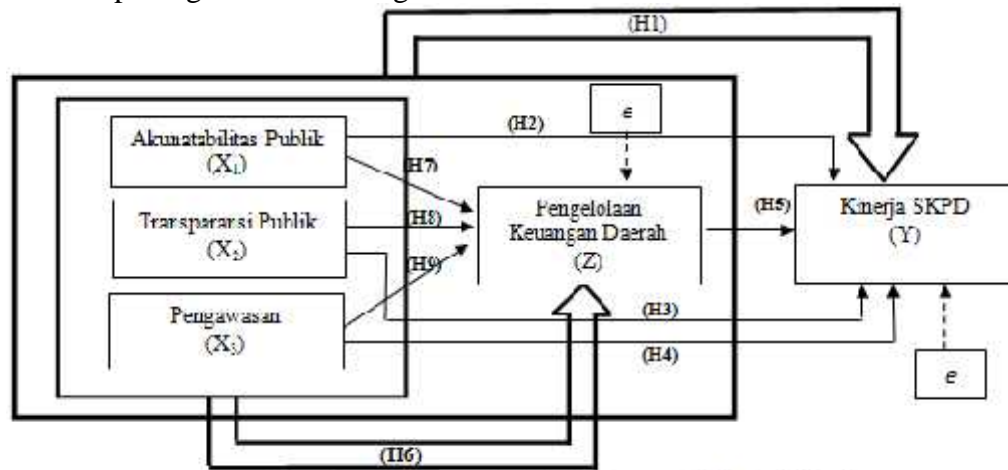
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiwirya (2013) yang melihat konsep akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada SKPD Kota Denpasar. Penelitian ini juga melihat implementasi akuntabilitas publik dan transparansi publik tetapi terdapat penambahan variabel penelitian lainnya yaitu pengawasan. Sehingga penelitian ini meneliti konsep akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Selain itu penelitian ini juga menambahkan variabel perantara yaitu pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, pengambilan sampel dalam penelitian ini juga diperluas, semua pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD akan dijadikan sampel penelitian.

Penelitian ini dilakukan karena *pertama*, hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu alat ukur dalam pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dari terakhir tidak mengalami perbaikan, opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). *Kedua*, hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo walau setiap tahunnya mengalami perbaikan, tetapi masih belum cukup memuaskan. Predikat penilaian kinerja untuk tahun 2015 masih mendapatkan nilai CC (cukup baik/memadai) sehingga jauh dari memuaskan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti sejauh mana pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja SKPD dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

### Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen), 1 (satu) variabel penyela/antara (intervening) dan 1 (satu) variabel terikat (dependen). Variabel bebas akuntabilitas publik ( $X_1$ ), transparansi publik ( $X_2$ ) dan pengawasan ( $X_3$ ) diperkirakan mempengaruhi baik simultan maupun parsial terhadap Kinerja SKPD (variabel  $Y$ ) baik secara langsung maupun melalui variabel penyela/antara yaitu pengelolaan keuangan daerah (variabel  $Z$ ). Pengelolaan keuangan daerah (variabel  $Z$ ) yang merupakan variabel penyela/antara (intervening) didasarkan pada hasil riset yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu pvariabel penyela/antara (intervening) juga didasarkan pada landasan teoritis yang dibangun dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



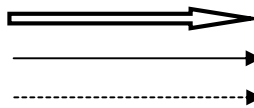
Gambar 1: Kerangka Pemikiran untuk Penelitian

### Keterangan :

Pengaruh secara simultan

Pengaruh secara parsial

Pengaruh variabel lain yang tidak diteliti



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan dugaan sementara yang akan ditindak lanjuti dalam penelitian ini yaitu:

$H_1$  : Diduga ada pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara simultan.

- H<sub>2</sub>: Diduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara parsial.
- H<sub>3</sub>: Diduga ada pengaruh transparansi publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara parsial.
- H<sub>4</sub>: Diduga ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara parsial.
- H<sub>5</sub>: Diduga ada pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara parsial.
- H<sub>6</sub>: Diduga ada pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo secara simultan.
- H<sub>7</sub>: Diduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening.
- H<sub>8</sub>: Diduga ada pengaruh transparansi publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening.
- H<sub>9</sub>: Diduga ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening.

## METODE

Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD. Data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari survei yang dilakukan oleh peneliti, berupa jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam variabel-variabel penelitian. Variabel independen terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan, 1 (satu) variabel antara yaitu variabel pengelolaan keuangan daerah, dan 1 (satu) variabel dependen yaitu kinerja SKPD.

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 60 (enam puluh) SKPD, yang terdiri dari dinas/badan/kantor sebanyak 31 (tiga puluh satu), kecamatan sebanyak 17 (tujuh belas) dan kelurahan sebanyak 12 (dua belas).

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pihak-pihak tersebut meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Sampel penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Kuesioner disebarkan langsung kepada responden di 43 (empat puluh tiga) SKPD. Sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) kuesioner yang kembali digunakan sebagai data penelitian.

Hasil jawaban kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert, yaitu pilihan jawaban responden diberi nilai dengan skala 5 poin, skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Jawaban responden diberi skor 1 (satu) untuk pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 (dua) untuk pilihan Tidak Setuju (TS), skor 3 (tiga) untuk



pilihan Tidak Tahu (TT), skor 4 (empat) untuk pilihan Setuju (S) dan skor 5 untuk pilihan Sangat Setuju (SS).

Teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan gambar model jalur, diajukan hubungan bahwa akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan mempunyai hubungan langsung dengan kinerja SKPD (p1). Namun demikian akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan juga mempunyai hubungan tidak langsung ke kinerja SKPD yaitu dari akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan ke pengelolaan keuangan daerah (p2) baru kemudian ke kinerja SKPD (p3). Total pengaruh hubungan dari akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan ke kinerja SKPD sama dengan pengaruh langsung akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan ke kinerja SKPD (koefisien path atau regresi p1) ditambah pengaruh tidak langsung yaitu koefisien path dari akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan ke pengelolaan keuangan daerah yaitu p2 dikalikan dengan koefisien path dari pengelolaan keuangan daerah ke kinerja SKPD yaitu p3. Dalam analisis jalur untuk melihat pengaruhnya langsung atau tidak langsung (melalui intervening) dilihat dari koefisien jalur langsung (p1) dibandingkan dengan perkalian antar koefisien jalur tidak langsung (p2 x p3). Apabila perkalian antar koefisien jalur tidak langsung lebih besar dari koefisien langsung, maka hubungannya adalah tidak langsung (Ghozali, 2006). Koefisien jalur adalah *standardize coefficients* regresi dan dihitung dengan membuat dua persamaan structural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini persamaan regresi tersebut adalah :

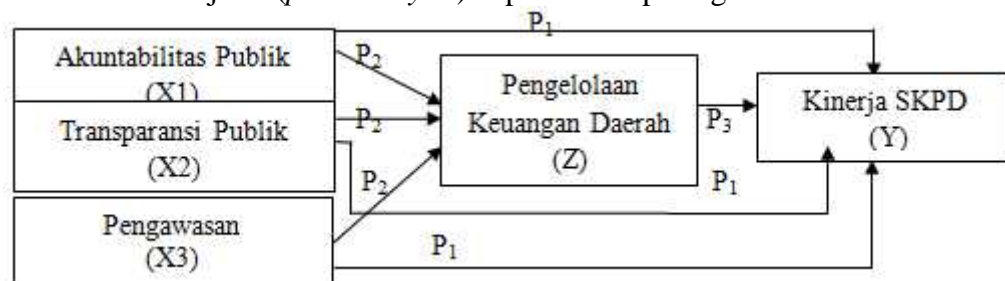
$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Z = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

- Y = Kinerja SKPD
- Z = Pengelolaan Keuangan Daerah
- X<sub>1</sub> = Akuntabilitas publik
- X<sub>2</sub> = Transparansi publik
- X<sub>3</sub> = Pengawasan
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel X1
- b<sub>2</sub> = Koefisien regresi variabel X2
- b<sub>3</sub> = Koefisien regresi variabel X3
- b<sub>4</sub> = Koefisien regresi variabel Z
- e = Error

Metode analisis jalur (*path analysis*) dapat dilihat pada gambar 2



**Gambar 2. Hubungan Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Kinerja SKPD dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening**

Dimana: P = nilai *standardize coefficients*



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Hipotesis Analisis Jalur Persamaan 1

#### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan kriteria : (1) Jika F hitung > F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, (2) Jika F hitung < F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil pengujian hipotesis dengan uji F disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Uji F Analisis Jalur Persamaan 1**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1481,566	4	370,392	47,677	,000 <sup>b</sup>
Residual	1437,224	185	7,769		
Total	2918,790	189			

Dari uji F atau uji Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 47,677 dengan tingkat signifikan sebesar  $p = 0,000$ . Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung > F tabel yaitu F hitung sebesar 42,066 > F tabel = 2,420 dengan tingkat signifikan  $p = 0,000$  yang lebih kecil (<) dari  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Artinya akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kemudian ke kinerja SKPD. Dengan demikian apabila akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan secara bersama-sama meningkat maka pengelolaan keuangan daerah dan kemudian ke kinerja SKPD juga akan meningkat.

#### Uji t

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan terhadap kinerja SKPD dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening dilakukan uji t dengan menggunakan analisis jalur persamaan 1, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi alpha 5% atau 0,05 dengan kriteria :

1. Jika p-value < 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima
2. Jika p-value > 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t disajikan dalam Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2 Hasil Uji t Analisis Jalur Persamaan 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,836	1,751		,477	,634
X1	,138	,061	,162	2,275	,024
X2	,148	,054	,189	2,754	,006
X3	,255	,055	,341	4,677	,000
Z	,135	,054	,166	2,485	,014

a. Dependent Variable: Y

Taraf nyata 5% dimana  $n=190$ , t tabel :  $df(190-5) = df(185) = 1,972$   $H_0$  diterima jika t hitung berada diantara -1,972 dan + 1,972  $H_a$  ditolak jika t hitung < -1,972 atau t hitung > 1,972. Dengan membandingkannya dengan tabel 4.20 hasil uji t (tabel coefficients) dapat diketahui bahwa:

- 1) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel akuntabilitas publik (X1) sebesar 2,275 dan signifikansi = 0,024 atau 2,4%. Diperoleh perbandingan t hitung

- = 2,275 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 2,4% < alpha = 5% maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh akuntabilitas publik (X1) terhadap kinerja SKPD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga  $H_2$  diterima.
- 2) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel transparansi publik (X2) sebesar 2,754 dan signifikansi = 0,006 atau 0,6%. Diperoleh perbandingan t hitung = 2,754 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 0,6% < alpha = 5% maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh transparansi publik (X2) terhadap kinerja SKPD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga  $H_3$  diterima.
- 3) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel pengawasan (X3) sebesar 4,677 dan signifikansi = 0,000 atau 0%. Diperoleh perbandingan t hitung = 4,677 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 0% < alpha = 5% maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh pengawasan (X3) terhadap kinerja SKPD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga  $H_3$  diterima.
- 4) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel pengelolaan keuangan daerah (Z) sebesar 2,485 dan signifikansi = 0,014 atau 1,4%. Diperoleh perbandingan t hitung = 2,485 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 1,4% < alpha = 5% maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah (Z) terhadap kinerja SKPD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga  $H_3$  diterima.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) terletak pada tabel *model Summary* dan tertulis *R Square*. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R Square/Adjusted R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3 Analisis Koefisien Determinasi Analisis Jalur Persamaan 1**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712 <sup>a</sup>	,508	,497	2,78725

a. Predictors: (Constant), Z, X3, X2, X1

Berdasarkan Tabel 3 terlihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,497, hal ini berarti 49,7% variabel dependen kinerja SKPD dapat dijelaskan oleh variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan) dan variabel penyalia yaitu pengelolaan keuangan daerah). Sedangkan sisanya (100% - 49,7% = 50,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model atau variabel yang digunakan.

Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2, X3 dan Z terhadap Y dapat dibuat melalui persamaan berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e_1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = 0,162 X_1 + 0,189 X_2 + 0,341 X_3 + 0,166 Z + 0,503 e_1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

## Pengujian Hipotesis Analisis Jalur Persamaan 2

### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan kriteria : (1) Jika F hitung > F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, (2) Jika F hitung < F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil pengujian hipotesis dengan uji F disajikan dalam Tabel 4. berikut ini:

**Tabel 4. Hasil Uji F Analisis Jalur Persamaan 2**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1787,046	3	595,682	42,066	,000 <sup>b</sup>
Residual	2633,906	186	14,161		
Total	4420,953	189			

a. Dependent Variable: Z

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dari uji F atau uji Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 42,066 dengan tingkat signifikan sebesar  $p = 0,000$ . Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung > F tabel yaitu F hitung sebesar 42,066 > F tabel = 2,650 dengan tingkat signifikan  $p = 0,000$  yang lebih kecil (<) dari  $\alpha = 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima. Maka akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja SKPD, atau dapat dikatakan bahwa bila akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan secara bersama-sama mengalami kenaikan atau penurunan maka akan berdampak pada kenaikan atau penurunan pengelolaan keuangan daerah.

### Uji t

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan terhadap kinerja SKPD dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening dilakukan uji t dengan menggunakan analisis jalur persamaan 2, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi alpha 5% atau 0,05 dengan kriteria :

1. Jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima
2. Jika  $p\text{-value} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t disajikan dalam Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5 Hasil Uji t Analisis Jalur Persamaan 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,969	2,362		-,410	,682
X1	,262	,080	,250	3,284	,001
X2	,285	,070	,295	4,091	,000
X3	,188	,072	,204	2,592	,010

a. Dependent Variable: Z

Taraf nyata 5% dimana  $n=190$ , t tabel :  $df(190-4) = df(186) = 1,972$   $H_0$  diterima jika t hitung berada diantara -1,972 dan + 1,972  $H_a$  ditolak jika t hitung < -1,972 atau t

hitung > 1,972. Dengan membandingkannya dengan Tabel 5 hasil uji t (tabel coefficients) dapat diketahui bahwa:

- 1) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel akuntabilitas publik (X1) sebesar 3,284 dan signifikansi = 0,001 atau 1%. Diperoleh perbandingan t hitung = 3,284 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 1% < alpha = 5% maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh akuntabilitas publik (X1) terhadap pengelolaan keuangan daerah (Z) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga H<sub>7</sub> diterima.
- 2) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel akuntabilitas publik (X1) sebesar 4,091 dan signifikansi = 0,000 atau 0%. Diperoleh perbandingan t hitung = 4,091 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 0% < alpha = 5% maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh transparansi publik (X2) terhadap pengelolaan keuangan daerah (Z) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga H<sub>8</sub> diterima.
- 3) Hasil perhitungan diatas diketahui nilai t hitung variabel pengawasan (X3) sebesar 2,592 dan signifikansi = 0,010 atau 1%. Diperoleh perbandingan t hitung = 2,592 > t tabel = 1,972 atau nilai signifikansi = 1% < alpha = 5% maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh pengawasan (X3) terhadap pengelolaan keuangan daerah (Z) pada Pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga H<sub>9</sub> diterima.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) terletak pada tabel *model Summary* dan tertulis *R Square*. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R Square/Adjusted R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6 Analisis Koefisien Determinasi Analisis Jalur Persamaan 2**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,636 <sup>a</sup>	,404	,395	3,76308

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan Tabel 6 terlihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,395, hal ini berarti 39,5% variabel penyela/antara (pengelolaan keuangan daerah) dapat dijelaskan oleh variabel independen (akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan). Sedangkan sisanya (100% - 39,5% = 60,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model atau variabel yang digunakan.

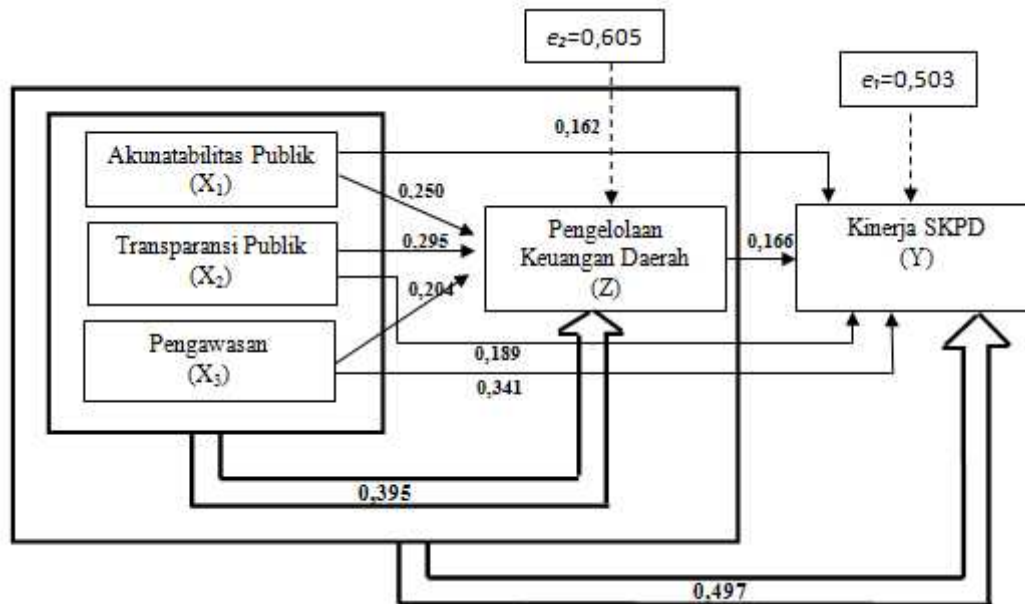
Kerangka hubungan kausal empiris antara X1, X2, X3 terhadap Z dapat dibuat melalui persamaan 2, sebagai berikut:

$$Z = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_2 \quad (2)$$

$$Z = 0,250 X_1 + 0,295 X_2 + 0,204 X_3 + 0,605 e_2 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil analisis jalur persamaan 1 dan persamaan 2 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dapat berpengaruh langsung ke kinerja SKPD dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu

akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan ke pengelolaan keuangan daerah lalu ke kinerja SKPD, jika digambarkan metode analisis jalur (*path analysis*) dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



**Gambar 3. Jalur Hubungan Kausal Empiris Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Kinerja SKPD dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening**

Berdasarkan Gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hasil Analisis Jalur Persamaan 1

- a. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung (melalui Z) dan pengaruh total tentang pengaruh langsung dan tidak langsung atas variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ), transparansi publik ( $X_2$ ), pengawasan ( $X_3$ ) dan pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Pengaruh langsung variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,162, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) =  $0,162 + (0,250 \times 0,166) = 0,162 + 0,0415 = 0,2035$ , sehingga pengaruh total akuntabilitas publik ( $X_1$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,2035.
  - 2) Pengaruh langsung variabel transparansi publik ( $X_2$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,189, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel transparansi publik ( $X_2$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) =  $0,189 + (0,295 \times 0,166) = 0,189 + 0,04897 = 0,2380$ , sehingga pengaruh total transparansi publik ( $X_2$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,2380.
  - 3) Pengaruh langsung variabel pengawasan ( $X_3$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,342, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel pengawasan ( $X_3$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) =  $0,342 + (0,204 \times 0,166) = 0,342 + 0,033864 = 0,3759$ , sehingga pengaruh total pengawasan ( $X_3$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,3759.
- b. Kontribusi akuntabilitas publik ( $X_1$ ) yang secara langsung mempengaruhi kinerja SKPD ( $Y$ ) sebesar  $0,162^2 = 0,0262$  atau 2,62%.

- c. Kontribusi transparansi publik (X2) yang secara langsung mempengaruhi kinerja SKPD (Y) sebesar  $0,189^2 = 0,0357$  atau 3,57%.
- d. Pengawasan (X3) yang secara langsung mempengaruhi Kinerja SKPD (Y) sebesar  $0,342^2 = 0,1169$  atau 11,69%.
- e. Kontribusi pengelolaan keuangan daerah (Z) yang secara langsung mempengaruhi Kinerja SKPD (Y) sebesar  $0,166^2 = 0,0275$  atau 2,75%.
- f. Kontribusi akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2), pengawasan (X3) dan pengelolaan keuangan daerah (Z) secara simultan yang langsung mempengaruhi Kinerja SKPD (Y) sebesar  $R^2 \text{ square} = 0,497 = 49,7\%$ . Sisanya sebesar  $0,503 = 50,3\%$  dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian.

## 2. Hasil Analisis Jalur Persamaan 2

- a. Kontribusi akuntabilitas publik (X1) yang secara langsung mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Z) sebesar  $0,250^2 = 0,0625$  atau 6,25%.
- b. Kontribusi transparansi publik (X2) yang secara langsung mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Z) sebesar  $0,295^2 = 0,087025$  atau 8,70%.
- c. Kontribusi pengawasan (X3) yang secara langsung mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Z) sebesar  $0,204^2 = 0,041616$  atau 4,16%.
- d. Kontribusi akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2), pengawasan (X3) secara simultan yang langsung mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Z) sebesar  $R^2 \text{ square} = 0,395 = 39,5\%$ . Sisanya sebesar  $0,605 = 60,5\%$  dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian.

Rangkuman dari dekomposisi dari koefisien jalur pengaruh langsung dan tidak langsung, pengaruh total, akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2) dan pengawasan (X3) melalui pengelolaan keuangan daerah kemudian ke kinerja SKPD digambarkan dalam Tabel 7 berikut:

**Tabel 7. Rangkuman koefisien jalur pengaruh langsung dan tidak langsung, pengaruh total**

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal		Sisa	Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Z	$r_1$ dan $r_2$	
X1 terhadap Y	0,162	(0,250 x 0,166)		0,2035
X2 terhadap Y	0,189	(0,295 x 0,166)		0,2380
X3 terhadap Y	0,342	(0,204 x 0,166)		0,3759
Z terhadap Y	0,166			0,166
X1, X2, X3, Z terhadap Y	0,497		0,503	1
X1 terhadap Z	0,250			0,250
X2 terhadap Z	0,295			0,295
X3 terhadap Z	0,204			0,204
X1, X2, X3 terhadap Z	0,395		0,605	1

Sumber : Hasil olahan Data SPSP

Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu dengan uji secara bersama-sama yang dilakukan pada variabel akuntabilitas publik (X1), transparansi publik (X2) pengawasan (X3), dan pengelolaan keuangan daerah (Z) terhadap Kinerja SKPD (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bungo menunjukkan hasil F hitung sebesar 47,677 dengan hasil tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan nilai yang signifikan. Hal

tersebut berarti akuntabilitas publik, transparansi publik pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah jika diregresikan bersama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Penelitian ini menunjukkan ketika akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah jika dilaksanakan secara serentak, maka kinerja SKPD akan menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dengan kata lain signifikan atau kinerja SKPD juga akan meningkat. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja SKPD, atau dapat dikatakan bahwa bila akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara bersama-sama mengalami kenaikan atau penurunan maka akan berdampak pada kenaikan atau penurunan kinerja SKPD.

Kenaikan kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo sejalan dengan laporan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan untuk tahun 2015 terjadi kenaikan nilai rata-rata kinerja khususnya di pemerintah daerah baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan pimpinan instansi pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki kinerjanya. Secara faktual kenaikan kinerja menunjukkan bahwasannya instansi pemerintah telah melakukan: a). Mengidentifikasi kinerja yang harus dicapai sesuai dengan peran dan fungsi atau alasan keberadaan instansi pemerintah b). Menetapkan indikator keberhasilan kinerja yang dapat diukur dan relevan dengan kinerja yang ingin dicapai; c). Merencanakan target kinerja; d). Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kinerja yang ingin dicapai; e). Menyelaraskan alokasi anggaran dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan; f). Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tersedia; g). Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya; h). Melakukan evaluasi untuk memberikan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja.

Hasil pengujian hipotesis dua ( $H_2$ ) dilakukan dengan menguji secara parsial akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD. Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardised beta akuntabilitas publik ( $X_1$ ) adalah sebesar 0,162 dan signifikan karena ( $p = 0,024$ )  $< 0,05$ , sehingga hipotesis kedua yang menduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Koefisien akuntabilitas publik ( $X_1$ ) bertanda positif, artinya apabila akuntabilitas publik semakin baik maka kinerja SKPD juga akan semakin baik.

Hasil pengujian ini sejalan dengan yang dikemukakan Mahmudi (2010) dalam Mardiasmo (2002) yang secara teoritis mengemukakan dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi terhadap penerapan akuntabilitas publik menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas publik dengan menunjuk Inspektorat dan Bappeda sebagai *leading* sektor dalam menerapkan akuntabilitas publik dengan upaya yang dilakukan diantaranya melakukan *review* terhadap dokumen anggaran SKPD, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, menerbitkan dan menyempurnakan peraturan pelaksana



baik peraturan bupati maupun peraturan daerah sebagai turunan dari peraturan yang lebih tinggi, melakukan pendampingan secara intensif kepada SKPD, membuat kontrak kerja yang berisi komitmen pimpinan SKPD untuk melaksanakan anggaran yang dikelolanya secara baik dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian hipotesis tiga ( $H_3$ ) dilakukan dengan menguji secara parsial transparansi publik terhadap kinerja SKPD. Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menduga ada pengaruh transparansi publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardized beta transparansi publik ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,189 dan signifikan karena ( $p = 0,006$ )  $< 0,05$ , sehingga hipotesis kedua yang menduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Koefisien transparansi publik ( $X_2$ ) bertanda positif, artinya apabila transparansi publik semakin baik maka kinerja SKPD juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo (2006) yang mengemukakan bahwa dalam prinsip dasar *good governance* yang dikemukakan salah satunya adalah transparansi, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menerapkan prinsip transparansi publik dilakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat dusun, kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan melibatkan semua unsur yang ada dimasyarakat. Rencana penerapan *e-budgeting* yang nantinya diharapkan masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi secara langsung terhadap pelaksanaan APBD, untuk langkah awal sudah dilakukan studi banding pada pemerintah Kota Surabaya.

Hasil pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) dilakukan dengan menguji secara parsial pengawasan terhadap kinerja SKPD. Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menduga ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardized beta pengawasan ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,341 dan signifikan karena ( $p = 0,000$ )  $< 0,05$ , sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menduga ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Koefisien pengawasan ( $X_3$ ) bertanda positif, artinya apabila pengawasan semakin baik maka kinerja SKPD juga akan semakin baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2014) yang menyatakan begitu pentingnya pengawasan terhadap suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran sejauhmana pelaksanaan pada organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek tidak lagi dilihat sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi-fungsi manajemen yang lain. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan untuk mencapai tujuan dari yang telah direncanakan, maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Hasil observasi atas penerapan pengawasan pada pemerintah Kabupaten Bungo diketahui, Inspektorat sebagai *leading* sektor dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyusun program kerja pengawasan setiap tahunnya, program kerja pengawasan ini disusun sebagai acuan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Dengan adanya program kerja pengawasan diharapkan adanya sinergi pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan pengawasan/pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK. Pimpinan SKPD juga telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Hasil pengujian hipotesis kelima ( $H_5$ ) dilakukan dengan menguji secara parsial pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Hipotesis kelima ( $H_5$ ) menduga ada pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Hasil pengujian didapatkan nilai koefisien standardized beta pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) adalah sebesar 0,166 dan signifikan karena ( $p = 0,014$ )  $< 0,05$ , sehingga hipotesis kelima ( $H_5$ ) yang menduga ada pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo diterima. Koefisien pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) bertanda positif, artinya apabila pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka kinerja SKPD juga akan semakin baik.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan teori yang apabila pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo

Upaya penataan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo diantaranya a). Penyempurnaan peraturan teknis yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dengan menerbitkan diantaranya peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peraturan bupati tentang sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, serta peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah; b). Pelatihan dan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis keenam ( $H_6$ ) yaitu dengan uji secara bersama-sama yang dilakukan pada variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ), transparansi publik ( $X_2$ ) dan pengawasan ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) pada Pemerintah Kabupaten Bungo menunjukkan hasil  $F$  hitung sebesar 42,066 dengan hasil tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan nilai yang signifikan. Hal tersebut berarti akuntabilitas publik, transparansi publik pengawasan jika diregresikan bersama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Penelitian ini menunjukkan ketika akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dilaksanakan secara serentak, maka pengelolaan keuangan daerah akan menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dengan kata lain signifikan atau pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengelolaan keuangan daerah, atau dapat dikatakan bahwa bila akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama mengalami kenaikan atau penurunan maka akan berdampak pada kenaikan atau penurunan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Amri dalam Halim (2012) dimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah: (1) akuntabilitas, (2) *value for money*, (3) kejujuran, (4) transparansi (5) pengendalian/pengawasan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012). Hasil audit dan pemeriksaan BPK No. 34.B/LHP/XVIII.JMB/5/2015 tanggal 25 Mei 2015 menyatakan jajaran dan pimpinan Pemkab Bungo cukup berkomitmen dalam menyelesaikan tidak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, hal tersebut terlihat dari perkembangan tindak lanjut atas permasalahan dalam aset tetap yang menjadi temuan dan pengecualian dalam LHP BPK tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Bungo untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) menduga ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Hasil pengujian menunjukkan besarnya pengaruh langsung variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,162, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung variabel akuntabilitas publik ( $X_1$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu  $0,250 \times 0,166 = 0,0415$ . Oleh karena nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung, maka pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan atau tidak berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan ( $H_8$ ) yang menduga ada pengaruh transparansi publik terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Hasil pengujian menunjukkan besarnya pengaruh langsung variabel transparansi publik ( $X_2$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,189, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung variabel transparansi publik ( $X_2$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu  $0,295 \times 0,166 = 0,04897 = 0,2380$ . Oleh karena nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung, maka pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan atau tidak berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan ( $H_9$ ) yang menduga ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Hasil pengujian menunjukkan besarnya pengaruh langsung variabel pengawasan ( $X_3$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) = 0,342, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel pengawasan ( $X_3$ ) terhadap kinerja SKPD ( $Y$ ) melalui pengelolaan keuangan daerah ( $Z$ ) dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu  $0,204 \times 0,166 = 0,033864$ . Oleh karena nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung, maka pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan atau tidak berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan amanah kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga

atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemerintah daerah setiap tahunnya mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada BPK untuk diaudit dan diberikan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang diaudit oleh BPK berupa opini. Pemberian opini audit oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemberian opini audit ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan pemerintah atas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah belum dapat mencerminkan tingkat kinerja secara keseluruhan pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain laporan keuangan diperlukan lagi laporan yang terkait dengan capaian kinerja. Laporan kinerja pemerintah daerah dinamakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP sendiri sudah ada sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan untuk menyempurnakan Inpres tersebut dan terakhir dirubah menjadi Laporan Kinerja (LKj). Mulai Tahun 2012, dilakukan evaluasi atas LKj pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Evaluasi dilakukan dengan penyimpulan dan penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi LKj tersebut diwujudkan dengan nilai yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Hendri Asmoko (2015) Reformasi terhadap penyempurnaan laporan keuangan dan pelaporan kinerja sebenar telah dilakukan yaitu dengan adanya upaya untuk menggabungkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan laporan kinerja pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 merupakan peraturan yang mencoba memulai menggabungkan kedua jenis laporan tersebut, akan tetapi dalam praktik tampaknya sekarang masih belum dapat berjalan dengan baik. Sekarang ini kedua laporan ini masih berjalan sendiri-sendiri (Asmoko, 2015).

Hasil pengujian hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) kedelapan ( $H_8$ ) kesembilan ( $H_9$ ) yang menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung, dan menyimpulkan pengelolaan keuangan daerah bukan merupakan atau tidak berfungsi sebagai variabel intervening bisa jadi disebabkan dengan belum sejalannya dan belum adanya korelasi antara opini audit BPK yang merupakan laporan dari hasil pengelolaan keuangan daerah dengan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

- b. Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
  - c. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
  - d. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
4. Pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
  - b. Transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
  - c. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD secara langsung dan secara tidak langsung melalui pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

#### **Saran-Saran**

1. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih luas lagi untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang memengaruhi kinerja SKPD.
2. Diharapkan agar peneliti berikutnya memperluas obyek penelitian dengan tidak terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah namun semua *stakeholder* yang berkepentingan dalam kinerja instansi publik dan menambah sampel sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan,
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, diusahakan dengan menggunakan tanya jawab dan observasi atau pengamatan langsung kepada obyek, dan/atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.
4. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Bungo, supaya memperhatikan para pengelola keuangan daerah sebagai salah satu bentuk usaha organisasi publik meningkatkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah dengan penempatan personil yang tepat, pemberian *reward* bagi yang berprestasi, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan jenjang pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk studi lebih lanjut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwirya, Muhammad Firdiansayah dan I Putu Sudana, 2015, *Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada atuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 11.2 (2015), hal 611-628.
- Asmoko, Hindri, 2015, *Korelasi Opini Audit BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi Lakip K/L*, Balai Diklat Kepemimpinan, BPPK Kementerian Keuangan, Jakarta.

- Asrida 2012, *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*, Jurnal Kebangsaan, Vol. 1, No.1, Januari 2012.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- , 2009, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- BPK, 2014, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2014*, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- , 2015, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015*, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- , 2015, *Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014*, Nomor: 34.A/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- , 2015, *Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014*, Nomor: 34.B/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- , 2015, *Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014*, Nomor: 34.C/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
- Ghozali Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2002, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- , 2012, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hazmi, Yusri, Ali Imran, Zuarni, Yeni Irawan, Said Herry Safrizal, 2012, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe, Studi Empiris pada SKPK Lhokseumawe*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Agustus 2012.
- Inspektorat Kabupaten Bungo, 2015, *Laporan Hasil Evaluasi terhadap Laporan Kinerja SKPD Kabupaten Bungo Tahun 2014*, Nomor: 700/44/Inspektorat/2015, Inspektorat Kabupaten Bungo.
- Kemenpan-RB, 2016, *Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta.
- Magno, Ruiivo Barros, Abdul Hakim, Tjahjanulin Domai, 2015, *Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. (Studi pada Kabupaten Ainara)*, Jurnal Reformasi, Vol. 5, No. 2, (2015)
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- , 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- , 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol 2, No 1, Mei 2006, hal 1-17
- , 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta

- Rahmat, Mukhlis Yunus, M. Sabri Abd. Majid, 2015, *Peranan Sumber Daya Manusia dalam Proses Perencanaan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie*, Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 2, pp. 39- 48, Mei 2015.
- Rai, I Gusti Agung, 2008, *Audit Kinerja pada Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- , 2007, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/0/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- , 2006, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- , 2003, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta.
- , 2004, *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta
- , 2014, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- , 2014, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, Jakarta.
- Riduwan, Engkos Achmad Kuncoro, 2012, *Cara Mudah Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*, Alfabeta, Bandung.
- Siregar, Liper, 2011, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderator pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugeng, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri*, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No.2, Juli 2014.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sulistioni, G, 2003, *Fiqh Korupsi : Amanah VS Kekuasaan*, Somasi, Nusa Tenggara Barat.
- Suparno, 2012, *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suriani, Seri, 2015, *The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo)*, Jurnal Information Management and Business Review Vol. 7, No. 4, pp. 6-22, August 2015.
- Tuasikal, Askam, 2008, *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku)*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.10, No. 1, Juni 2008